

SINOPSIS

Pro kontra tentang keistimewaan DIY dan pengisian jabatan Gubernur antara kalangan akademisi dan kalangan tradisional yang menghendaki penetapan dan yang menghendaki pemilihan. Masyarakat Yogyakarta menghendaki adanya penetapan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode berikutnya. Namun pemerintah pusat lebih menginginkan diadakan pemilihan langsung dalam menentukan gubernur Yogyakarta selanjutnya. Pro kontra tersebut berakhir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tehnik-tehnik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, wawancara yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, tehnik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh, diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY (UU No 13 Tahun 2012) bersumber dari media massa (76.7%) dan informasi berasal dari mata kuliah (23.3%). Dengan pengetahuan dan informasi yang didapat, maka mahasiswa bisa persepsi karena ia memiliki nilai, keyakinan dan pengetahuan untuk berpersepsi. Persepsi mahasiswa tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagian besar setuju 67.8%, Persepsi mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan tentang pengaturan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY setuju 62.2%, Persepsi tentang kewenangan istimewa di bidang kebudayaan adalah setuju (62.2%), Persepsi tentang kewenangan istimewa di bidang pertanahan sangat setuju (72.2%), Persepsi tentang kewenangan istimewa di bidang tata ruang setuju (84.4%).

Saran Persepsi mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan terhadap Undang-Undang Keistimewaan DIY menjadi penting karena selain untuk pengembangan studi politik persepsi juga menjadi penting saat mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan menjadi seorang pemimpin. Karena berbeda persepsi maka akan berbeda sikap. Nilai, keyakinan, dan pengetahuan membentuk persepsi, dan persepsi membentuk sikap. Jika salah persepsi maka berakibat pada salah sikap. Sehingga dibutuhkan pengetahuan baik